

Pusat Versus Daerah Dalam Perkembangan Kesenian Indonesia Mutakhir *

Oleh : Ariel Heryanto

SALAH satu isu penting dan berusia panjang dalam kesenian mutakhir kita ialah pertentangan di antara apa yang disebut pusat (Jakarta) lawan daerah (luar Jakarta). Salah satu puncak gelombang perdebatan mengenai hal itu terjadi pada tahun 1983 dan 1984. Artinya, bukan baru pada tahun-tahun itu persoalan tersebut muncul. Bukan pula berarti persoalan itu telah berakhir sesudah lewatnya tahun-tahun itu.

Catatan ringan ini dimaksudkan menyorot beberapa bagian yang amat penting, tetapi kurang mendapat perhatian, dalam perdebatan tentang hal tadi. Untuk memperjelas masalah, perlu ditinjau kembali secara ringkas, bagaimana masalah itu diperdebatkan sejauh ini. Kemudian akan dikaji apa-apa yang telah luput dari kebanyakan pemahaman umum tentang masalah tersebut.

Masalah Kompleks

Dua pokok pikiran besar telah muncul secara menonjol dari perdebatan mengenai pertentangan kesenian pusat lawan daerah sejauh ini. Pertama: ada kesadaran meluas di kalangan seniman di berbagai daerah (luar Jakarta) tentang adanya semacam dominasi kegiatan/orientasi/nilai berkesenian di Indonesia. Dalam pemahaman itu, dominasi tersebut dikuasai orang-orang Jakarta, dan dominasi itu telah meliputi wilayah kesenian di daerah-daerah lain. Mereka yang di Jakarta biasanya menolak atau menyangkal tuduhan demikian.

Kedua: ada berbagai usaha di kalangan seniman, pengamat seni dan pengelola kegiatan kesenian di daerah-daerah untuk melawan dominasi itu, dan membentuk suatu wilayah kesenian loka/regional yang mandiri. Kegiatan itu kadang-kadang disertai semangat anti-seni-Jakarta. Semangat itu, dengan sendirinya, seringkali menimbulkan sikap balas-dendam dari mereka yang di Jakarta.

Dalam beberapa hal, pandangan dan cita-cita kesenian di daerah-daerah tersebut dapat dipahami, atau bahkan dibenarkan. Tetapi ini tidak berarti pandangan dan cita-cita itu sudah sepenuhnya benar atau tepat. Mungkin ada beberapa pokok dari masalah tersebut yang telah tertangkap. Tapi kompleksitas nyata dari permasalahan tersebut tampaknya masih kurang dipahami secara memadai.

Tanpa pemahaman yang memadai, upaya baik para seniman, pengamat seni, dan pengelola kegiatan seni di daerah-daerah itu akan menjadi mubazir, timpang atau lumpuh. Rekan-rekan mereka yang di Jakarta, sesudah dan karena dimusuhi, pada akhirnya akan mentertawakan lumpuhnya permusuhan yang dilontarkan dari daerah-daerah itu.

Lumpuhnya usaha memandirikan kegiatan berkesenian di daerah-daerah itu bukan disebabkan karena sebenarnya tidak ada semacam dominasi dalam kesenian kita. Juga bukan disebabkan karena pihak-pihak di Jakarta yang mereka musuhi sudah sepenuhnya benar atau secara relatif lebih benar dalam menangkis serangan yang datang dari luar Jakarta.

Seperti telah disinggung di atas, kelompok itu lebih disebabkan oleh lemahnya pemahaman atas persoalan dominasi kesenian yang sebenarnya kompleks. Lebih kompleks daripada yang selama ini biasa diperdebatkan orang. Kompleksitas persoalan itu juga tak mungkin diuraikan secara terperinci atau selengkap-lengkapannya dalam catatan yang sangat terbatas ini. Namun, dalam keterbatasan tulisan ini masih diharapkan terungkapnya beberapa segi penting dari persoalan di atas yang selama ini kurang mendapatkan perhatian.

Yang Terabaikan

Ada tiga hal yang dalam kesempatan terbatas ini perlu diungkapkan untuk melengkapi pemahaman kita mengenai kompleksitas persoalan dominasi kesenian mutakhir di Indonesia.

Pertama: mengenai batasan istilah pusat — daerah. Pengertian yang membatasi kedua istilah yang dipertentangkan itu tidak dapat secara memuaskan di acu pada dua "kubu" yang terpisah secara tegas atau hitam-putih. Kedua kubu yang dipertentangkan itu tidak dapat dipahami secara memuaskan sebagai dua kenyataan yang dibatasi menurut wilayah geografis atau kategori pemisahan wilayah kewenangan administratif formal ketatanegaraan (propinsi, misalnya). Persoalan kesenian bukanlah sekedar "cermin" kenyataan ketatanegaraan atau peta ilmu bumi.

Kedua: apa yang sering disebut pusat mau pun daerah tidak dapat secara memuaskan dipahami sebagai dua bongkah/sistem kenyataan yang masing-masing homogen atau seragam.

Ketiga: biar pun batasan persoalan kesenian tidak dengan sendirinya paralel atau sejajar dengan batasan geografis, sosial, politik, atau ekonomi, namun di antara keduanya terdapat kaitan-kaitan yang penting. Keduanya tidak saling terpisah sendiri-sendiri.

Ketiga hal diatas perlu diuraikan lebih jauh agar semakin jelas. Walau digolong-golongkan menjadi tiga macam kelompok masalah, semua hal-hal di atas pada kenyataannya membentuk suatu kesatuan persoalan yang terpadu. Sehingga, uraian lebih lanjut tentang ketiganya tidak akan disajikan secara sendiri-sendiri.

Pernyataan umum bahwa ada dominasi berkesenian oleh mereka yang di Jakarta (pusat) atas rekan-rekannya di berbagai daerah (luar Jakarta) bisa menyesatkan. Pernyataan demikian, walau ada benarnya, telah menyederhanakan suatu kenyataan persoalan yang kompleks. Di balik pernyataan umum itu, biasanya terdapat pemahaman tentang suatu pertentangan dua pihak yang masing-masing kompak, seragam dan saling terpisah.

Padahal, baik di Jakarta maupun di berbagai daerah lain terdapat kemajemukan situasi berkesenian. Terdapat kemajemukan peran dan status para seniman, pengamat seni, dan penge-

lola kegiatan kesenian, serta orientasi nilai berkesenian. Baik di Jakarta maupun di berbagai daerah lain, tampak adanya jenjang-jenjang status berkesenian dan kesenimanan. Di masing-masing tempat terdapat semacam dominasi juga, oleh yang lebih kuat terhadap yang lebih lemah.

Ketegangan atau permusuhan di antara sesama seniman, pengamat seni, atau pengelola kegiatan kesenian di satu daerah (luar mau pun dalam Jakarta) dapat dibandingkan dengan ketegangan atau permusuhan antar daerah yang disebut pusat (Jakarta) lawan daerah (luar Jakarta). Sementara itu, pada saat yang sama, terjadi ikatan atau persekutuan di antara beberapa pihak di Jakarta dengan beberapa pihak di berbagai daerah.

Dalam catatan ini sengaja tidak disebutkan nama-nama orang atau lembaga yang berhubungan dengan kesenian. Penulis yakin, pembaca yang pernah mengikuti perdebatan tentang dominasi pusat-daerah dapat mengamati sendiri pribadi-pribadi dan lembaga kesenian yang punya hubungan-hubungan sebagaimana terurai diatas.

Membenahi Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan hal-hal di atas, secara singkat dapat dikatakan bahwa persoalan dominasi kesenian merupakan persoalan ketidak-seimbangan kekuatan sosial-politik-ekonomi (termasuk gengsi dan sebagainya) dalam kesenian. Yakni persoalan kesenjangan seni (man) golongan kuat dan mereka yang lemah.

Istilah kuat dan lemah tampaknya lebih mengena daripada istilah pusat dan daerah sebagaimana telah lasim digunakan orang. Sebab, tidak semua seniman, pengamat seni atau pengelola kegiatan kesenian dari Jakarta dapat dikategorikan kuat atau dominan. Tak semua yang di daerah-daerah lain dapat disebut lemah atau terdominasi.

Sejumlah tidak kecil seniman, pengamat seni, atau pengelola kegiatan kesenian yang muda / yunior dari Jakarta tidak berna-sib / berstatus lebih baik daripada mayoritas rekan-rekannya di berbagai daerah. Mereka sama-sama terdominasi. Tetapi mungkin tetap benar, mereka

(Bersambung ke hal VIII kol. 1-3)

yang kuat atau dominan di Jakarta secara relatif masih lebih kuat atau dominan ketimbang mereka yang kuat atau dominan di daerah-daerah lain.

Dengan demikian, perubahan perumusan masalah dominasi yang diajukan di sini tetap tidak mengingkari adanya sebetulnya dominasi dalam kesenian kita, sebagaimana juga halnya dominasi di bidang-bidang kehidupan lain (sosial, politik, ekonomi, kebudayaan dan lain-lain). Juga tidak diingkari bahwa puncak dominasi itu berada di tangan beberapa pihak yang tinggal di Jakarta. Alternatif perumusan masalah dominasi yang diajukan di sini berbeda dari perumusan yang telah lasim dalam menjelaskan penyebaran kekuatan dominasi itu pada tingkat-tingkat yang lebih rendah.

Penyebaran itu tidak paralel dengan batas-batas geografis atau pembagian wilayah ketatanegaraan, melainkan kombinasi dari sejumlah masalah. Dari pengalaman individual orang, kedudukan sosial-politik-ekonominya, juga wilayah huninya secara geografis.

Mengenai perumusan permasalahan dominasi di antara kelompok kuat dan lemah masih diperlukan penjelasan tambahan. Pertama-tama, harus diingat bahwa yang dimaksud dengan kuat dan lemah tersebut bukanlah masalah kreativitas estetis individual seniman, tetapi status dan peran sosialnya dalam kancah kesenian. Kedua, penggolongan berbagai pihak dalam kesenian hanya menjadi dua jenis (kuat dan lemah) tersebut merupakan penyederhanaan analisa masalah. Pada kenyataannya, di antara dua ujung penggolongan yang ekstrim itu terdapat sebagian besar dari mereka yang berkesenian dengan aneka kekuatan (agak kuat, sedang, agak lemah dan sebagainya).

Ketiga, mereka yang sama-sama tergolong kuat atau tergolong lemah pada kenyataannya tidak selalu membentuk suatu ikatan/persekutuan/kerjasama yang jelas atau eksplisit. Tak ja-

*) clari

Sinar Harapan,
Sabtu, 15 Februari 1986
Halaman VI

* Penulis adalah staf pengajar Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga.

Pusat Versus

(Sambungan dari hal VI)

rang terjadi bentrok kepentingan di antara sesama mereka sendiri.

Usaha Alternatif

Usaha banyak pihak di daerah-daerah untuk melawan dominasi kesenian sering kali diarahkan pada cita-cita membentuk wilayah berkesenian lokal/regional yang mandiri dan bebas dari campur-tangan rekan-rekannya di Jakarta. Tak jarang mereka berusaha atau bercita-cita membentuk lembaga-lembaga kesenian yang dimiliki Jakarta, misalnya dewan kesenian atau Taman Ismail Marzuki, di daerah sendiri. Banyak di antara mereka yang mengkampanyekan kegiatan berkarya seni tentang, lewat lembaga, dan teruntuk masyarakat di lingkungan terdekatnya sendiri saja.

Tanpa menilai baik atau tidaknya cita-cita demikian, saya berpendapat tak banyak yang dapat diharapkan dari usaha semacam itu. Usaha semacam itu tidak cukup realistis, dan kemungkinan besar tidak akan dapat terwujud, karena cenderung mengabaikan dua hal yang sangat penting.

Pertama: kemandirian dalam kesenian sulit atau bahkan mustahil dapat terbentuk selama atau karena tidak disertai adanya kemandirian dalam bidang-bidang kehidupan lain yang esensial dalam masyarakat setempat. Misalnya, sistem sosial, ekonomi, politik, pendidikan, dan sebagainya. Kegiatan kesenian tidak pernah dapat otonom secara murni atau steril dari persoalan-persoalan yang tersebut belakangan tadi.

Kedua: bahkan untuk bidang kesenian itu sendiri, kemandirian yang dicita-citakan seringkali tidak bersifat mendasar atau radikal. Banyak di antara usaha-usaha demikian masih mengambil model pola berkesenian di Jakarta, termasuk dalam mendambakan semacam dewan kesenian atau semacam Taman Ismail Marzuki di daerah. Sering-

kali pula, usaha-usaha itu dipimpin (atau bergantung pada kepemimpinan) tokoh-tokoh kesenian lokal yang sebenarnya beraspirasi kesenian model di Jakarta. Tokoh-tokoh lokal tersebut didevasakan (dalam berkesenian) oleh pola kesenian yang berpusat di Jakarta, dan dari masa ke masa menjadi partner kerja tokoh-tokoh kesenian di Jakarta sendiri.

Usaha menanggulangi dominasi kesenian yang kini merajalela di Indonesia perlu dirumuskan secara lain daripada sekedar membentuk Jakarta - Jakarta baru di berbagai daerah.

Salah satu usaha alternatif yang agaknya lebih realistis dan sekaligus mendasar ialah upaya menciptakan kemajemukan aneka konsep dasar, orientasi dan nilai kesenian tanpa harus memusuhi segala sesuatu atau siapa saja yang datang dari luar daerah sendiri.

Dalam kemajemukan itu, berbagai jenjang status sosial seni (man) yang telah mapan dapat dicairkan dan sekaligus direlatifkan. Dalam usaha demikian pencinta dan pencipta karya seni di daerah dapat atau bahkan perlu membina kerja sama dengan berbagai pihak dari wilayah geografis mana pun dan dari status sosial manapun. Termasuk rekan-rekannya yang hidup di Jakarta dan pusatnya kesenian di Jakarta sendiri, selama terdapat kemiripan aspirasi.

Seperti telah disinggung di atas, selera/konsep/orientasi kesenian di Jakarta beraneka ragam. Walau mungkin benar, salah satu diantaranya bersifat dominan. Tak sedikit di antara mereka yang bersimpati pada usaha mencairkan dominasi kesenian yang kini melanda di Indonesia. Tak sedikit di antara mereka yang bersimpati dengan rekan-rekannya yang berkarya di daerah-daerah. Orang-orang Jakarta seperti ini tidak perlu dimusuhi pencipta dan pecinta karya seni di daerah-daerah yang mencita-citakan kemajemukan nilai dan corak kesenian mutakhir di Indonesia. ***